

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan harus memperhatikan kinerja keuangan perusahaannya untuk kelancaran kegiatan usahanya. Kinerja yang baik akan berdampak positif terhadap perusahaan sehingga perusahaan akan berjalan dengan optimal dan sesuai target yang telah direncanakan. Kinerja keuangan juga bisa mengukur suatu keberhasilan perusahaan tersebut, dan bisa mendeteksi kesehatan keuangan perusahaan untuk mampu bertahan beroperasi serta mampu bersaing dengan instansi lainnya. Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan (Dwiermayanti, 2009) dalam Sinaga (2014). Perusahaan yang mempunyai kinerja yang bagus akan terjamin kelangsungan hidupnya karena akan mendapat kepercayaan dari publik, sehingga publik akan merasa nyaman untuk berinvestasi di perusahaan. Untuk mengetahui bagaimana kinerja yang dicapai oleh suatu perusahaan perlu dilakukan penilaian kinerja (Lingle et. al, 1996) dalam Hanafi (2015).

Bank berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebagai sebuah lembaga intermediasi atau perantara keuangan dimana banyak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membutuhkan dana dari pihak ketiga, bank harus senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat. Ariyanti (2010) dalam Setyorini (2015) mengungkapkan bahwa kepercayaan dan loyalitas pemilik dana kepada bank merupakan faktor yang sangat membantu dan mempermudah pihak manajemen bank untuk menyusun strategi bisnis yang baik. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh bank untuk menjaga kepercayaan serta tingkat loyalitas masyarakat pada bank adalah dengan selalu menunjukkan kinerja yang baik. Dengan kinerja yang baik maka nilai saham di pasar sekunder dan jumlah dana pihak ketiga akan ikut meningkat. Kinerja keuangan bank menunjukkan gambaran kondisi keuangan pada bank tertentu baik menyangkut aspek penghimpun dana maupun penyaluran dana. Kinerja keuangan tentu diharapkan untuk selalu menunjukkan angka yang positif sehingga kepercayaan masyarakat pun akan terjaga (Setyorini, 2015).

Terdapat dua pendekatan yang biasa digunakan para peneliti untuk menentukan kinerja perusahaan, yakni pendekatan pasar dan pendekatan laporan keuangan (Ujunwa, 2012) dalam Sinaga (2014). Pendekatan laporan keuangan menggunakan angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan. Beberapa rasio keuangan yang digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan berdasarkan pendekatan laporan keuangan diantaranya adalah ROA dan ROE (Martsila, 2013) dalam Sinaga (2014).

Guna menciptakan suatu kinerja yang baik, *Good Corporate Governance* (tata kelola perusahaan yang baik) sangat berperan penting dalam menjalani kegiatan operasional perusahaan itu sendiri. Tidak hanya itu, perusahaan juga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus meningkatkan manajemen risiko agar bisa mengendalikan risiko atau memprediksi risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Buruknya tata kelola perusahaan bisa menimbulkan dampak negatif pada perusahaan itu sendiri. Kegagalan perusahaan berskala besar, skandal-skandal keuangan dan krisis-krisis ekonomi di berbagai negara, telah memusatkan perhatian kepada pentingnya *corporate governance*. Kebijakan lembaga keuangan berskala besar dalam pendanaan perusahaan, mulai memasukkan syarat-syarat pelaksanaan *corporate governance* pada perusahaan-perusahaan yang didanainya.

Penerapan *Corporate Governance* di Indonesia sendiri semakin marak diperbincangkan setelah terjadinya krisis pada tahun 1997. Krisis moneter yang melanda Indonesia pada waktu itu berimbas pada krisis kepercayaan dan krisis keuangan dunia. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas memungkinkan terjadinya manipulasi informasi oleh perusahaan. Pelanggaran yang bertentangan dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dikalangan perusahaan Indonesia terjadi karena sangat minimnya peraturan yang jelas akan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dengan kinerja perusahaan seperti pemegang saham, dewan komisaris maupun dewan direksi, serta *stakeholders* lainnya, sehingga kendali akan kinerja perusahaan menjadi sangat longgar. Mekanisme *good corporate governance* memiliki beberapa indikator yang berupa komite audit, ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan latar belakang pendidikan komisaris (Hanafi, 2015).

Pada perusahaan keuangan seperti perbankan khususnya pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) siap untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

memperketat bisnis BPR dengan GCG dan Manajemen Risiko. Adapun penerapan ini tertuang pada Peraturan OJK (POJK) No. 4 Tahun 2015 tentang penerapan tata kelola yang baik bagi BPR dan POJK No. 13 Tahun 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR. Karena minimnya GCG dan Manajemen Risiko pada BPR membuat banyaknya melakukan kecurangan hingga tidak sedikit BPR yang ditutup operasinya. Sejak 2013 hingga 2015 ada 90 kasus yang terindikasi *fraud* (kecurangan) di perbankan. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menutup sebanyak lima Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sejak awal tahun 2016. Diperkirakan jumlah BPR yang ditutup ini akan bertambah hingga 8 BPR. (Sindonews.com)

Menurut POJK No. 4 Tahun 2015 pasal 2 ayat 1 menyatakan BPR wajib menerapkan tata kelola dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut: pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris, kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern, penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal, batas maksimum pemberian kredit, rencana bisnis BPR serta transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. Sedangkan POJK No. 13 Tahun 2015 pasal 2 ayat 1 menyatakan BPR wajib menerapkan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam peraturan otorisi jasa keuangan ini. Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit meliputi: 1. Pengawasan direksi dan dewan

komisaris; 2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit yaitu: kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko; 3. Kecukupan proses dan sistem yaitu: a) proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko; b) sistem informasi manajemen risiko; dan 4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Hingga Mei 2016 ada sebanyak lima BPR yang harus dilikuidasi atau bank dalam likuidasi (BDL) karena memiliki rata-rata rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (CAR) -96,39 persen. Ini menunjukkan bank tidak lagi memiliki kemampuan dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha serta menampung kemungkinan risiko kerugian yang diakibatkan dalam operasional bank. Selain itu, rata-rata rasio kredit macet atau *non performing loan* (NPL) mencapai 65,83 persen. Sejak beroperasi tahun 2006 sampai 31 Maret 2016 lalu, LPS telah melakukan penanganan klaim 69 bank yang dicabut izin usahanya. Dari jumlah itu, 62 bank telah selesai proses *recovery*.(Republika.co.id)

Ada beberapa hal mendasar yang mengharuskan BPR menerapkan GCG dan manajemen risiko. *Pertama*, masih ada BPR dicabut izin usahanya bukan karena kalah dalam persaingan tapi disebabkan pengurus BPR belum melaksanakan GCG dengan penuh tanggung jawab. *Kedua*, penataan, pengelolaan kekayaan, dan keuangan BPR masih ada yang belum dilakukan secara profesional dan masih ada untuk kepentingan pribadi. *Ketiga*, pengelolaan risiko di BPR masih banyak kelemahan, bahkan masih ada yang belum paham tentang risiko sehingga *performance* BPR menurun karena belum memahami risiko yang ditimbulkan.(Sindonews.com)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di pekanbaru, pada tahun 2016 ini masih ada beberapa BPR yang mengalami kredit macet dimana NPL (*Non Performance Loan*) berada diatas 5% berdasarkan laporan keuangan triwulan yang di publikasikan di website Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berikut ini adalah jumlah BPR yang mengalami kredit bermasalah atau kredit macet di pekanbaru pada tahun 2016:

Tabel 1.1 Persentase NPL BPR di Pekanbaru

Nama BPR	NPL Maret	NPL Juni	NPL September
Mitra Rakyat Riau	10,97%	9,09%	9,13%
Duta Perdana	43,12%	37,3%	18,05%
Indomitra Mega Kapital	17,35%	19,76%	17,18%
Mandiri Jaya Perkasa	6,37%	6,98%	7,65%
Putra Riau Mandiri	7,81%	7,68%	6,51%

(Sumber: Laporan Keuangan Publikasi di website ojk)

Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) adalah sebesar 5%. Berdasarkan data diatas, BPR tersebut telah mencapai NPL diatas 5% dan bersifat naik turun. Kredit bermasalah memberikan dampak tidak baik bagi bank. Semakin besar kredit masalah yang dihadapi oleh bank, maka pendapatan bank semakin terganggu yang menyebabkan tingkat kesehatan operasi bank menurun. Penurunan kualitas kredit dan tingkat kesehatan bank mempengaruhi modal dan likuiditas bank tersebut.

Dengan menerapkan tata kelola perusahaan dan manajemen risiko memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja perusahaan, mampu bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan serta bisa menerapkan etika bisnis untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat dan transparan. Menurut (Surya dan Yustiavandana, 2008) prinsip-prinsip utama dari

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

GCG yang menjadi indikator, sebagaimana ditawarkan oleh *Organization and Development* (OECD), adalah: kewajaran (*Fairness*), Keterbukaan/Transparansi (*Disclosure/Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), dan Responsibilitas (*Responsibility*). Berdasarkan POJK No. 4 Tahun 2015 pasal 1 ayat 7, tata kelola adalah tata kelola BPR yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), independensi (*independency*), akuntabilitas (*accountability*), responsibilitas (*responsibility*), dan kewajaran (*fairness*). Kelima prinsip tersebut menjadi indikator untuk mengukur kinerja keuangan pada Bank Perkreditan Rakyat. Dalam mewujudkan prinsip transparansi, perusahaan harus menyediakan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu kepada *stakeholder*.

Dengan keterbukaan informasi tersebut maka para *stakeholder* dapat menilai kinerja berikut dengan mengetahui risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi perusahaan. Independensi merupakan suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Untuk meningkatkan independensi dalam pengambilan keputusan bisnis, perusahaan hendaknya mengembangkan beberapa aturan, pedoman, dan praktek di tingkat pengurus bank. Bentuk implementasian prinsip akuntansi ini antara lain: praktek audit internal yang efektif serta kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam anggaran dasar perusahaan, kebijakan, dan prosedur di bank. Pada penerapan prinsip responsibilitas ini diharapkan membuat perusahaan menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya seringkali menghasilkan eksternalitas (dampak luar kegiatan perusahaan) negatif yang harus ditanggung oleh masyarakat. Prinsip

kewajaran merupakan perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Kewajaran juga mencakup adanya kejelasan hak-hak *stakeholder* berdasarkan sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak investor khususnya pemegang saham minoritas dari berbagai bentuk kecurangan.

Bagi bank, untuk berkembang dan maju, penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) secara serius dan efektif merupakan tuntutan yang makin tidak dapat ditawar lagi. Untuk tujuan penerapan GCG itu, iklim yang kondusif perlu diciptakan dan perlu terus-menerus dipelihara. Dalam pedoman GCG Perbankan Indonesia dinyatakan untuk terciptanya kondisi yang mendukung implementasi GCG yang efektif, salah satu tugas yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan otoritas terkait adalah penerbitan peraturan perundang-undangan yang memungkinkan dilaksanakan GCG secara efektif. Selain itu, pemerintah dan otoritas terkait harus mampu menjamin dan membuktikan bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) dilakukan secara serius.

Menurut (Hanafi, 2015) *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Yang Baik) adalah seperangkat aturan yang digunakan untuk mengatur hubungan pihak internal dan eksternal perusahaan agar dapat berjalan baik dan selaras sesuai dengan yang seharusnya demi mencapai tujuan umum perusahaan. Zarkasyi (2008) dalam Hanafi (2015) mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai struktur yang oleh *stakeholder*, pemegang saham, komisaris dan manajer

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyusun tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan mengawasi kinerja.

Jadi, pentingnya penerapan tata kelola dan manajemen risiko pada suatu perusahaan adalah agar terciptanya suatu kinerja yang efektif dan efisien. Perusahaan juga harus memikirkan strategi-strategi yang akan dilakukan dalam pencapaian suatu tujuan dengan tetap mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Komitmen BPR terhadap penerapan GCG yang konsisten, akan mampu menjauhkan BPR dari berbagai masalah yang berisiko tinggi. Tanpa didukung praktik GCG, BPR berpotensi menjadi tidak sehat. Hal ini dapat berisiko dan merusak BPR itu sendiri.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan menambahkan variabel manajemen risiko dan objek penelitian yang dilakukan di BPR dengan studi empiris. Penelitian terdahulu seperti Mappaselle mengambil objek pada Bank Umum seperti PT. BRI dengan studi kasus yang fokus pada satu objek dan variabel yang digunakan hanya prinsip-prinsip GCG, dan penelitian yang dilakukan oleh Agus Setiawaty dengan menggunakan mekanisme GCG dan manajemen risiko dijadikan variabel intervening serta peneliti lainnya seperti Bulandari, Kadek Krismaya, dan Pradnyaswari yang hanya menggunakan variabel prinsip-prinsip GCG.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENGARUH IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN**



MANAJEMEN RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT DI PEKANBARU”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan landasan latar belakang, penulis merumuskan suatu masalah yaitu:

- a. Apakah pengaruh transparansi terhadap kinerja keuangan Bank Perkreditan Rakyat di Pekanbaru?
- b. Apakah pengaruh independensi terhadap kinerja keuangan Bank Perkreditan Rakyat di Pekanbaru?
- c. Apakah pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja keuangan Bank Perkreditan Rakyat di Pekanbaru?
- d. Apakah pengaruh responsibilitas terhadap kinerja keuangan Bank Perkreditan Rakyat di Pekanbaru?
- e. Apakah pengaruh kewajaran terhadap kinerja keuangan Bank Perkreditan Rakyat di Pekanbaru?
- f. Apakah pengaruh manajemen risiko terhadap kinerja keuangan Bank Perkreditan Rakyat di Pekanbaru?
- g. Apakah pengaruh transparansi, independensi, akuntabilitas, responsibilitas, kewajaran, dan manajemen risiko terhadap kinerja keuangan Bank Perkreditan Rakyat di Pekanbaru?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah yang dibuat, maka penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap kinerja keuangan Bank Perkreditan Rakyat di Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap kinerja keuangan Bank Perkreditan Rakyat di Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja keuangan Bank Perkreditan Rakyat di Pekanbaru.
- d. Untuk mengetahui pengaruh tanggung jawab terhadap kinerja keuangan Bank Perkreditan Rakyat di Pekanbaru.
- e. Untuk mengetahui pengaruh kewajaran terhadap kinerja keuangan Bank Perkreditan Rakyat di Pekanbaru.
- f. Untuk mengetahui pengaruh manajemen risiko terhadap kinerja keuangan Bank Perkreditan Rakyat di Pekanbaru.
- g. Untuk mengetahui pengaruh transparansi, independensi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan manajemen risiko terhadap kinerja keuangan Bank Perkreditan Rakyat di Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

- a. Bagi akademisi, penelitian ini bisa dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya mengenai GCG dan Manajemen Risiko.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bagi pihak perbankan, penelitian ini bisa dijadikan acuan dalam melaksanakan operasional perusahaan agar selalu menerapkan tata kelola dan manajemen risiko guna menciptakan kinerja yang baik.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Telaah Pustaka

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian-penelitian terdahulu yang memperkuat penelitian ini, serta kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis dari penelitian ini.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai deskripsi variabel penelitian yang digunakan, penentuan sampel dan populasi data yang akan digunakan. Selain itu bab ini juga berisi jenis dan sumber data, metode pengumpulan data yang akan digunakan, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : Hasil dan Analisis

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai deskriptif objek penelitian, analisis data serta pembahasan dari hasil penelitian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini menjelaskan keseluruhan hasil penelitian seperti kesimpulan, keterbatasan, dan saran-saran untuk perbaikan penelitian berikutnya untuk penelitian yang sama di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

